**LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**“Inklusi Kelompok Rentan dan Gender**

**dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban”**

**Sasaran Keberhasilan : Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban**

**Ukuran Keberhasilan : Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender**

**B12 (2021) : Sosialisasi kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender yang melibatkan OMS**

Bicara mengenai pemberian perlindungan kepada korban, kelompok rentan dan gender yang dikatakan sebagai Penerima Bantuan Hukum, maka hal yang perlu dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yaitu dapat berupa pendampingan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dalam bentuk litigasi dan non litigasi.

Apabila bantuan hukum dalam ranah litigasi maka hal yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum adalah dalam rangka melindungi hak-haknya sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam perkara pidana. Misalnya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kemudian untuk perkara perdata yaitu pada tahap gugatan dan persidangan; dan untuk perkara tata usaha negara yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kapasitas paralegal serta sosialisasi kepada para pelaksana Bantuan Hukum, untuk mengefektifkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat maka perlu menargetkan arah sosialisasi dan pendidikan hukum kepada pihak yang lebih aksesibel bagi masyarakat untuk meminta pertolongan bantuan hukum, seperti misalnya Paralegal.

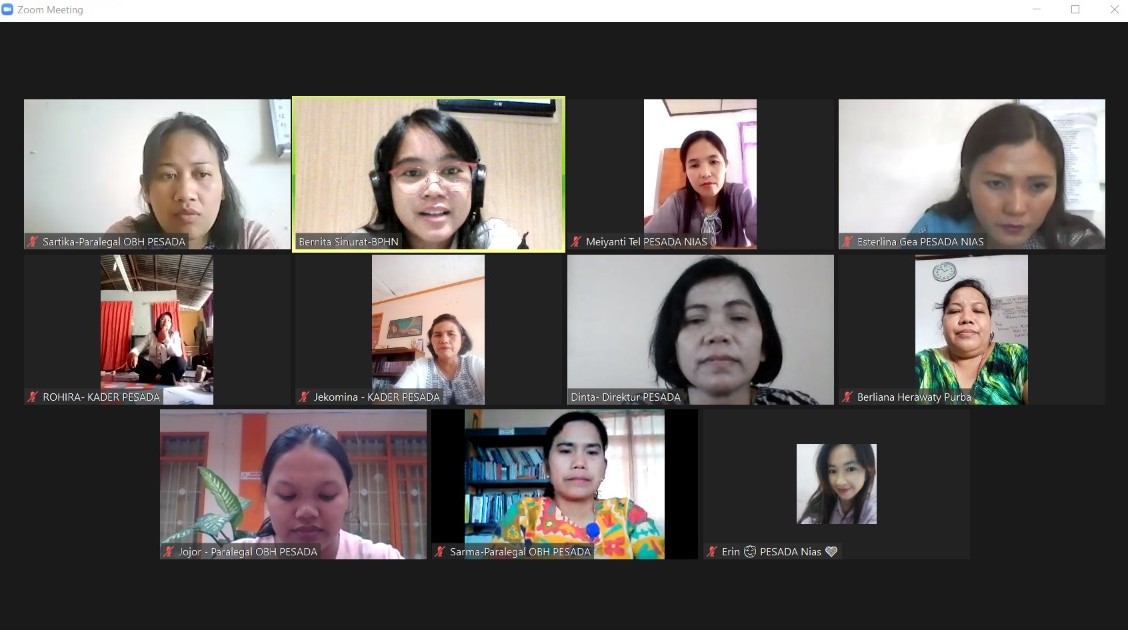
Bagaimana Paralegal mampu menjelaskan bahwa kesetaraan gender muncul akibat ketidakadilannya pembedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Dimana kaum perempuan khususnya di budaya patriarkhi di anggap kaum yang lemah, dan hanya bertugas di dapur, sumur dan Kasur. Dengan adanya budaya dan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat yang memarjinalkan kaum perempuan, maka munculah kesetaraan gender dan hal ini semakin parah jika seorang perempuan sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan berhadapan dengan masalah hukum.

Pasca tertuangnya materi terkait Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan dalam kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, maka diperlukan adanya suatu upaya penyebarluasan informasi melalui sosialisasi bagi Pemberi Bantuan Hukum khususnya pelaksana-pelaksana Bantuan Hukum. Adapun point-point dalam sosialisasi sebagaimana dimaksud yaitu diharapkan pelaksana Bantuan Hukum, seperti Paralegal memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan;
2. Dapat menjelaskan konsep gender, minoritas, dan kelompok rentan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia; dan
3. Dapat menggali issue-issue terkait gender, minoritas dan kelompok rentan.

BPHN telah melakukan sosialisasi berkaitan dengan kurikulum dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender kepada beberapa Pemberi Bantuan Hukum. Adapun data kegiatan sebagaimana dimaksud yaitu terlampir.

**LAMPIRAN DATA DUKUNG**

1.  PERKUMPULAN SADA AHMO (PESADA)
2. LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN



1. LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA JUSTICE & PEACE

